























PEMBANGUNAN KETAHANAN MASYARAKAT MISKIN KOTA INDONESIA

RINGKASAN EKSEKUTIF
October 2021

Hubungan antara kemiskinan dan perubahan iklim membutuhkan perhatian khusus.

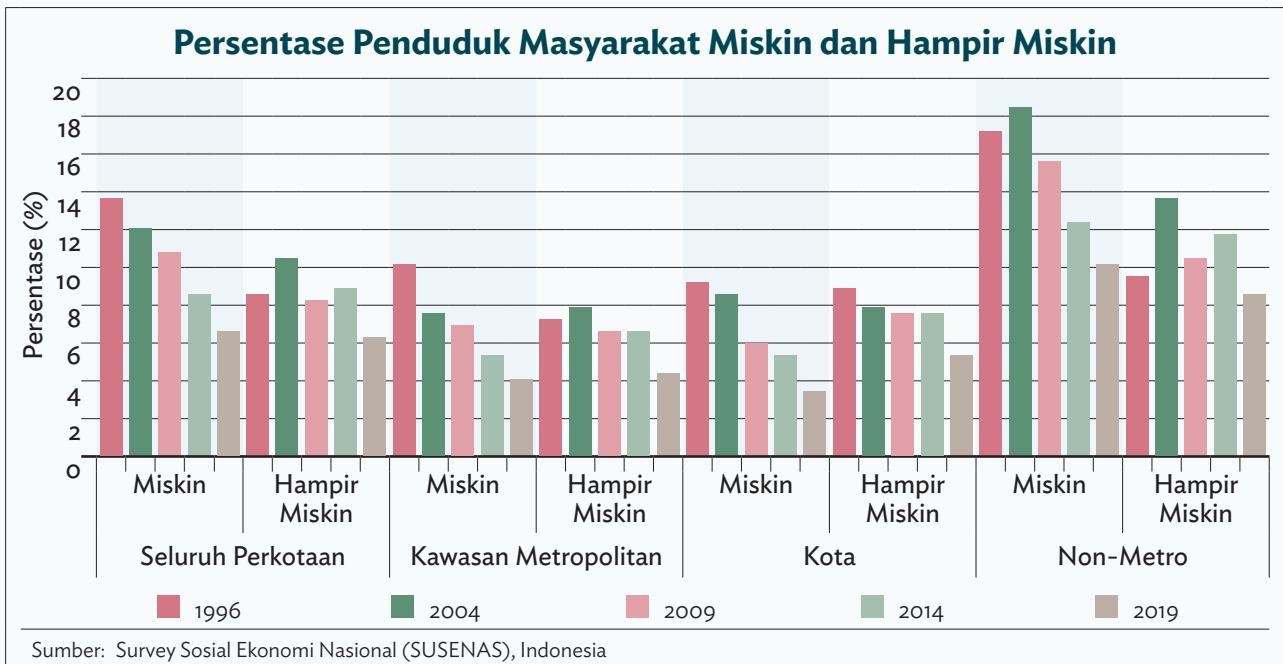
Risiko perubahan iklim dan bencana merupakan ancaman serius pada pembangunan sosial ekonomi Indonesia dan dapat mengganggu perolehan pendapatan negara yang saat ini juga sudah cukup sulit. Berbagai risiko tersebut diperkirakan akan meningkat di masa mendatang dengan adanya perubahan iklim, dengan dampak yang meluas pada empat sektor prioritas dalam Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI) 2020-2045.

Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim 2020-2045

Proyeksi iklim dan bahaya	 Air	 Pertanian	 Kesehatan	 Kelautan dan pesisir
Suhu ekstrem				
Kenaikan muka laut				
Perubahan pola curah hujan				
Perubahan kejadian cuaca ekstrem				

Sumber: Dokumen Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim 2020-2045 (diolah)

Guncangan dan tekanan iklim juga akan memaksa penduduk yang hampir miskin masuk ke dalam kategori miskin. Oleh karenanya, diperlukan hubungan yang lebih erat antara upaya untuk menurunkan kemiskinan dan meningkatkan ketahanan iklim sehingga pencapaian keduanya dapat berkelanjutan. Intervensi pengentasan kemiskinan, termasuk penurunan beban ekonomi, penanganan isolasi spasial, dan peningkatan kapasitas ekonomi, perlu direncanakan dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan risiko iklim saat ini dan masa depan. Aksi iklim perlu direncanakan dengan seksama sehingga dapat memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat miskin dan hampir miskin serta mencegah meningkatnya kerentanan dan ketidaksetaraan. Visi tersebut sangat selaras dengan agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.



Fokus yang jelas dalam pembangunan ketahanan bagi masyarakat miskin dan hampir miskin di perkotaan menunjukkan bahwa urbanisasi menguntungkan seluruh pihak secara merata. Kawasan perkotaan, mencakup hampir 55% penduduk Indonesia, merupakan kawasan yang responsif (hot spots) terhadap risiko perubahan iklim dan bencana yang pada umumnya memiliki tingkat keterpaparan dan kerentanan yang tinggi terhadap bencana alam. Risiko iklim dan bencana diperkirakan akan meningkat seiring dengan banyaknya kota yang menghadapi peningkatan muka laut dan peningkatan aktivitas manusia menyebabkan efek pulau bahang di perkotaan (urban heat island). Sekitar 7% penduduk perkotaan adalah masyarakat miskin dan dengan persentase yang hampir sama berada sedikit di atas garis kemiskinan. Masyarakat miskin dan hampir miskin seringkali tinggal di permukiman kumuh dan tidak resmi, dengan kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas layanan dasar yang buruk, mereka harus menghadapi guncangan dan tekanan perubahan iklim yang berdampak pada aset, mata pencaharian, dan tabungan mereka yang terbatas, memaksa mereka untuk mengadopsi strategi penanggulangan yang tidak tepat. Dengan tidak adanya aksi ketahanan iklim yang berpihak pada masyarakat miskin, maka dampak tersebut dapat meningkatkan kemiskinan dan ketidaksetaraan. Krisis pandemi virus corona (COVID-19) yang terjadi semakin memperparah kerentanan masyarakat miskin dan hampir miskin sehingga urgensi untuk membangun ketahanan, khususnya bagi yang berisiko tinggi sangat dibutuhkan.

“Aksi iklim perlu direncanakan dengan baik sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat miskin dan hampir miskin dan tidak menyebabkan terjadinya peningkatan kerentanan dan ketidaksetaraan.”

Penguatan ketahanan masyarakat miskin di perkotaan membutuhkan rangkaian intervensi yang secara kolektif memperkenalkan strategi solutif dan transformatif.

Risiko perubahan iklim hanya dapat dikelola dengan mempertimbangkan secara seksama dampak di masa depan dan mengadopsi serangkaian strategi pada skala spasial dan temporal yang tepat. Strategi yang dirumuskan harus mencakup (i) mekanisme yang solutif (*coping mechanism*), (ii) upaya adaptasi (*incremental adaptation*) untuk mengantisipasi perubahan iklim, dan (iii) solusi transformatif yang membawa perubahan sistemik untuk mengurangi akar masalah kerentanan terhadap perubahan iklim dalam jangka panjang. Strategi-strategi tersebut harus dapat dicapai di berbagai skala, dengan mempertimbangkan kegiatan dan intervensi yang sesuai. Mengingat kondisi lokal dan kewilayahan mempengaruhi kerentanan, maka intervensi harus sesuai dengan prinsip subsidiaritas; yaitu, keputusan terkait upaya memperkuat ketahanan dalam pembangunan dibuat secara mudah.



Kebijakan dan program nasional yang berpihak pada masyarakat miskin membuka peluang untuk memperkuat ketahanan dalam skala besar.

Indonesia memiliki kebijakan dan program nasional yang tersebar di berbagai sektor dan menjangkau masyarakat miskin, termasuk yang berada di perkotaan. Indonesia juga telah mengidentifikasi sektor prioritas untuk adaptasi perubahan iklim: air, kelautan dan pesisir, pertanian, dan kesehatan – yang masing-masing secara langsung berdampak pada kehidupan, mata pencaharian, dan kesejahteraan masyarakat miskin kota. Dengan demikian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan program yang berpihak pada masyarakat miskin kota dapat ditingkatkan untuk mengatasi risiko iklim yang terjadi, khususnya pada sektor prioritas, dengan tetap memberikan solusi yang dapat meningkatkan kapasitas rumah tangga miskin kota dan masyarakat luas untuk beradaptasi dan bertransformasi untuk menghadapi risiko iklim pada masa mendatang. Pendekatan ini tidak hanya untuk menurunkan bahaya, namun juga untuk (i) memberikan contoh intervensi pembangunan ketahanan yang dapat mengatasi faktor sistemik dalam merespon iklim dan pengaruhnya, dan (ii) meningkatkan kapasitas, termasuk ketrampilan baru, untuk bertahan dalam menghadapi peningkatan risiko iklim dan bencana.

Kerangka untuk membangun ketahanan masyarakat miskin kota

Lima bidang prioritas yang berpihak pada masyarakat miskin yang disertai dengan serangkaian faktor pendukung merupakan kerangka untuk memperkuat ketahanan masyarakat miskin kota. Intervensi di dalam lima bidang prioritas—perlindungan sosial, sistem kesehatan masyarakat, mata pencaharian, permukiman, dan infrastruktur—sangat penting untuk mengamankan dan mempertahankan ketahanan masyarakat miskin kota di Indonesia. Keberhasilan di setiap bidang akan ditentukan oleh serangkaian faktor pendukung: tata kelola, data, dan pembiayaan. Selain itu, dibutuhkan pula skala dan jenis intervensi yang tepat, untuk memastikan bahwa (i) tujuan, input, dan aktivitas selaras dengan skala dampak dari rumah tangga hingga skala dampak yang lebih besar; (ii) prinsip subsidiaritas terintegrasi (dimana dilakukan dengan berjenjang dan sesuai kewenangan pada level pemerintah); dan (iii) intervensi direncanakan sehingga dapat memberikan dampak yang sesuai dengan besarnya jumlah penduduk kota di Indonesia.



“Intervensi di dalam lima bidang prioritas—perlindungan sosial, sistem kesehatan masyarakat, mata pencaharian, permukiman, dan infrastruktur—sangat penting untuk mengamankan dan mempertahankan ketahanan masyarakat miskin kota di Indonesia.”



Perlindungan sosial adaptif dan responsif

Program bantuan sosial masyarakat dan pekerja adalah mekanisme solutif untuk rumah tangga miskin pada saat terjadi guncangan, termasuk yang berkaitan dengan perubahan iklim, dan memastikan tujuan pembangunan sosial tidak terganggu. Terlebih lagi, program tersebut dapat memberikan ruang untuk pengembangan adaptasi transformatif melalui peningkatan keterampilan, mata pencaharian, dan pembiayaan inklusif yang responsif terhadap guncangan dan tekanan perubahan iklim. Peran perlindungan sosial dalam pembangunan ketahanan juga terdapat dalam RPJMN 2020-2024, dan pemerintah Indonesia telah menginisiasi proses pengembangan Peta Jalan Perlindungan Sosial Adaptif. Untuk memberikan strategi adaptasi yang bermanfaat bagi masyarakat miskin kota, sistem perlindungan sosial perlu menyesuaikan respon efektif dalam menghadapi risiko perubahan iklim.

Rekomendasi aksi terdiri dari:



Menjadikan perlindungan sosial sebagai salah satu strategi adaptasi dalam perencanaan kebijakan adaptasi nasional dan daerah



Mengintegrasikan data dan informasi bencana alam, keterpaparan dan kerentanan ke dalam database perlindungan sosial



Memperkuat kelembagaan program bantuan sosial sehingga dapat memperluas cakupan secara horisontal maupun vertikal pascabencana dan meningkatkan keterlibatan pemerintah daerah



Menggali potensi program untuk pekerja yang secara langsung mendukung pembangunan di sektor prioritas PBI 2020-2045



Menyelaraskan pembiayaan untuk program perlindungan sosial dengan Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana serta memperkenalkan inovasi pembiayaan seperti pembiayaan berbasis prakiraan (*forecast-based financing*)



Meningkatkan kesadaran fasilitator program terhadap risiko perubahan iklim dan bencana

Mengecualikan penduduk rentan (seperti pedagang makanan di Kelurahan Sunyaragi di Kota Cirebon) dari sistem perlindungan sosial dapat membatasi ketahanan mereka untuk siap siaga dalam menghadapi atau menahan guncangan.





Dampak perubahan iklim pada aset dan modal (alam, fisik, finansial, dan manusia) yang menjadi dasar mata pencaharian masyarakat miskin kota, memerlukan langkah-langkah kombinasi untuk memperkuat ketahanan, termasuk tabungan dan jaring pengaman; stabilitas dan keragaman penghasilan; pendidikan, keterampilan, dan pola pikir; dan jaringan sosial serta mobilitas. Rekomendasi aksi di bawah selaras dengan RPJMN 2020-2024, yang menyediakan dorongan kuat penyusunan kebijakan untuk mengembangkan mata pencaharian dalam konteks pengentasan kemiskinan.

Rekomendasi aksi terdiri dari:



Memperkenalkan kebijakan yang ditargetkan untuk pengembangan mata pencaharian dan dapat mencakup masyarakat miskin di sektor informal, termasuk penduduk yang bermigrasi akibat perubahan iklim, dan meningkatkan kapasitas dengan keterampilan baru yang dapat membantu membuka peluang di perkotaan



Menggali peluang implementasi program ketahanan mata pencaharian untuk masyarakat miskin kota melalui pemerintah daerah dan pemanfaatan Dana Desa/ Kelurahan



Mengimplementasikan inisiatif dalam penguatan ketahanan di usaha kecil dan menengah melalui peningkatan kapasitas sehingga rencana bisnis dapat berkesinambungan dan akses terhadap asuransi bencana meningkat



Memperkenalkan program pembiayaan mikro yang berketahanan bencana, termasuk pembentukan dana kebencanaan untuk organisasi pembiayaan mikro sehingga dapat merespon klien perkotaan dalam merespon guncangan iklim

Pedagang makanan wanita di Pasar Glodok, Jawa Barat



+ Sistem kesehatan masyarakat yang efektif

Perubahan iklim juga akan berdampak pada kesehatan masyarakat miskin di Indonesia. Hal ini termasuk morbiditas dan mortalitas karena tekanan panas, dan tingginya kejadian penyakit tular vektor dan penyakit yang ditularkan melalui air. Selain itu juga terdapat potensi dampak secara tidak langsung, seperti kekurangan gizi karena tingginya harga makanan sebagai akibat dari dampak perubahan iklim di sektor pertanian. Oleh karena itu, pembangunan ketahanan masyarakat miskin pada sektor kesehatan sangatlah penting.

Rekomendasi aksi terdiri dari:



Menyusun kebijakan adaptasi perubahan iklim sektor kesehatan serta rencana yang melibatkan berbagai kemungkinan dampak yang timbul pada kesehatan sebagai dampak dari perubahan iklim, termasuk tekanan panas yang terjadi di perkotaan, dan keterkaitannya dengan sektor lain seperti ketahanan pangan, air dan sanitasi



Meningkatkan penggunaan informasi risiko perubahan iklim untuk menyusun dan melaksanakan rencana dan output program kesehatan, bangunan, layanan dasar, dan permukiman sehingga dapat mengatasi faktor pendorong kerentanan



Memperkuat sistem peringatan dini dan pengawasan yang dapat memprediksi dampak perubahan iklim pada kesehatan dan dapat menginformasikan aksi kesiapsiagaan di tingkat tapak



Memperkenalkan program sebagai solusi dari masalah tekanan panas (*heat stress*) yang dapat memberikan dukungan langsung untuk pekerja luar ruangan dalam mengatasi permasalahan kesehatan dan keamanan



Memperkuat kesadaran masyarakat melalui isu pengembangan keluarga dalam program asistensi sosial dan kurikulum baru di pendidikan dini mengenai perubahan iklim dan kesehatan

Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai keterkaitan antara air yang terkontaminasi dengan penyebaran penyakit tertentu dapat meningkatkan kesehatan dan ketahanan masyarakat miskin kota.





Rumah aman bencana



Bencana alam, termasuk dampak cuaca ekstrem dapat merusak perumahan rumah tangga miskin karena tingkat keterpaparan yang tinggi, lemahnya konstruksi, dan penggunaan material di bawah standar. Suhu ekstrem dapat mengganggu kondisi dalam ruangan karena rumah tersebut tidak didesain tahan terhadap suhu tinggi. Kenaikan muka laut yang menyebabkan genangan pesisir juga dapat menurunkan kualitas struktur perumahan.

Kebijakan dan program perlu mempertimbangkan bahwa perumahan dan permukiman merupakan proses sosial dengan masyarakat sebagai pusatnya. Dengan demikian, masyarakat dapat mengadopsi model dan pendekatan baru seperti permukiman berbasis komunitas, inisiatif pembelian tanah, dan pembangunan partisipatif in situ untuk perumahan tangguh bencana, untuk memastikan bahwa rumah tangga miskin masuk ke dalam prioritas.

Rekomendasi aksi terdiri dari:



Menguatkan kebijakan yang terinformasi risiko bencana, rehabilitasi, dan relokasi yang berpihak pada masyarakat miskin



Melembagakan proses penilaian risiko iklim dan bencana untuk memperoleh pilihan lokasi, desain perumahan, pilihan material bangunan, dan pemeliharaan perumahan rakyat



Memperkuat koordinasi terkait perencanaan penggunaan lahan perkotaan, penyediaan infrastruktur pada skala masyarakat dan kota, dan pembangunan perumahan



Memperkenalkan pembiayaan mikro untuk mendukung rumah tangga miskin dalam membangun perumahan tangguh bencana, penguatan perumahan eksisting, dan perbaikan dan rekonstruksi perumahan yang rusak karena bencana



Perumahan aman dan terjangkau yang dikembangkan di Kelurahan Kalijaga, Kota Cirebon adalah komponen penting untuk meningkatkan ketahanan masyarakat miskin kota.



Infrastruktur masyarakat yang dapat diandalkan (*robust*)

Kejadian cuaca ekstrem dan bencana yang dipicu oleh bahaya geofisik dapat merusak infrastruktur penyediaan air, sanitasi, drainase, pengelolaan limbah, jalan, listrik, dan ruang untuk masyarakat (*community space*). Dengan demikian, perlu dipastikan aspek keandalan masing-masing infrastruktur sebagai bagian dari sistem infrastruktur. Infrastruktur juga perlu memperkenalkan aspek keberlanjutan, khususnya sumber keberlanjutannya. Dalam kasus penyediaan air, sumber air harus berkelanjutan untuk memastikan ketersediaan jangka panjang dalam menghadapi perubahan iklim. Sebagaimana dalam PBI 2020-2045, sektor air adalah salah satu sektor prioritas dan kebutuhan akan pembangunan infrastruktur penyimpanan air, rehabilitasi daerah tangkapan hujan, daur ulang air dan teknologi reklamasi, penguatan regulasi pengelolaan sumber daya air, dan kapasitas masyarakat dalam mengoptimalkan penggunaan air untuk mencegah kekurangan air. Implementasi infrastruktur masyarakat yang tangguh membutuhkan perubahan dalam perencanaan dan pelaksanaan yang “*business as usual*”. Terobosan aksi diperlukan untuk mendukung implementasi RPJMN 2020-2024 yang menargetkan penyediaan 10 juta sambungan untuk mencapai cakupan 100% air bersih dan 90% akses sanitasi.

Rekomendasi aksi terdiri dari:



Mengadopsi pendekatan pengelolaan air yang berketahanan iklim seperti pemanenan air hujan dan biofiltrasi air, dan perencanaan pada level Daerah Aliran Sungai (DAS) antar wilayah



Mengintegrasikan pertimbangan risiko iklim dalam penyusunan dan pelaksanaan program penyediaan air dan sanitasi berbasis masyarakat untuk mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan dan praktik informasi iklim dalam pengelolaan air, sanitasi, dan kebersihan



Mendorong infrastruktur hijau sebagai bagian dalam program untuk mendukung layanan dasar masyarakat

Instalasi pengolahan limbah komunal dan fasilitas toilet umum yang didanai oleh *Islamic Development Bank* di Kelurahan Kasepuhan, Kota Cirebon adalah contoh infrastruktur untuk masyarakat yang diimplementasikan melalui program pengentasan kemiskinan.





Melaksanakan aksi ketahanan di kebijakan bidang tertentu membutuhkan tata kelola yang terinformasi risiko bencana dan inklusif; data iklim, bencana, dan kemiskinan; dan pengamanan aspek finansial. Faktor-faktor ini menyediakan lingkungan yang kondusif untuk mengamankan dan memperkuat ketahanan, dan juga penting untuk memfasilitasi inovasi dan kerja sama yang dibutuhkan.

“Dampak bencana alam dapat dirasakan di berbagai wilayah, meskipun kegiatan yang menyebabkan keterpaparan terhadap bencana tersebut terjadi di luar wilayah yang terdampak.”



Tata kelola yang terinformasi risiko bencana

Tata kelola mempengaruhi keamanan kepemilikan, akses dan operasi infrastruktur dan layanan dasar, perlindungan sosial, dan dukungan mata pencaharian—yang semuanya memiliki pengaruh penting terhadap risiko dan ketahanan bencana. Kerangka kerja desentralisasi pemerintah di Indonesia merupakan basis kuat untuk aksi lokal sesuai dengan kebutuhan. Namun, penguatan koordinasi tetap diperlukan lintas instansi dengan program kegiatan yang berfokus pada peningkatan ketahanan karena dampak bencana alam dapat dirasakan di berbagai wilayah, meskipun kegiatan yang menyebabkan keterpaparan terhadap bencana tersebut terjadi di luar wilayah yang terdampak. Selain itu, peningkatan kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengarusutamakan informasi risiko bencana dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah serta dan keputusan untuk investasi. Proses perencanaan partisipatif dari bawah ke atas (*bottom-up*) seperti Musrenbang menyediakan platform untuk memahami kebutuhan dan prioritas ketahanan masyarakat dan untuk memperkuat kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil



Data yang tepat dan dapat dipercaya

Sifat multidimensi kemiskinan, serta berbagai bahaya baik saat ini yang akan datang dan dampak yang muncul baik secara langsung maupun tidak langsung sangat penting untuk dipertimbangkan ketika program ketahanan direncanakan, didesain, dan diimplementasikan sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Bagian yang penting adalah analisis untuk memperoleh pemahaman dari sebaran spasial dan temporal bahaya, keterpaparan, kerentanan di berbagai skala. Hal ini tentunya membutuhkan data iklim dan risiko bencana yang diperoleh di tingkat tapak yaitu masyarakat miskin kota dan secara spasial. Penggunaan data iklim dan risiko bencana seperti SIDIK dan InaRISK untuk membuat keputusan terkait pengentasan kemiskinan perlu diperkuat. Selain itu, pertukaran data lintas batas administrasi dan penguatan kompatibilitas antar sistem data juga penting.



Pembiayaan tambahan dan yang difokuskan kembali

Pembiayaan untuk ketahanan masyarakat miskin kota perlu diidentifikasi, distimulasi, dijamin, dan dipertahankan sehingga berdampak baik pada intervensi individu dan seluruh ekosistem pembiayaan perkotaan yang terkait dengan ketahanan dan pengentasan kemiskinan. Pembiayaan semacam ini dapat berasal dari: (i) transfer fiskal yang diberikan kepada pemerintah daerah, (ii) sumber pendanaan dalam negeri terkait perubahan iklim, (iii) hibah luar negeri dari kerja sama bilateral dengan lembaga dan organisasi masyarakat sipil, dan (iv) *global climate funds*. Sumber pendanaan ini kemudian diteruskan melalui instansi terkait secara optimal dengan memperhatikan prinsip subsidiaritas. Transfer fiskal seperti Dana Desa/Kelurahan perlu digunakan secara strategis untuk meningkatkan ketahanan dalam konteks pembangunan daerah. Cakupan Dana Insentif Daerah dapat diperluas untuk memberikan insentif kegiatan adaptasi perubahan iklim. Pembiayaan perubahan iklim domestik dan internasional juga perlu digunakan secara strategis sehingga dapat membuka peluang pembiayaan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat miskin kota. Menjamin dan mempertahankan pembiayaan untuk peningkatan ketahanan membutuhkan dukungan teknis jangka panjang sehingga pemerintah daerah perlu mengintegrasikan prioritas yang terdapat di dalam PBI 2020-2045 ke dalam perencanaan dan anggaran daerah.

Rekomendasi investasi iklim di lima bidang strategis

Program pengentasan kemiskinan merupakan awal yang baik untuk meningkatkan ketahanan masyarakat miskin kota dalam menghadapi guncangan dan tekanan iklim. Program yang bersifat fasilitasi adaptasi transformatif di skala nasional, membutuhkan lima bidang strategis. Kelima bidang strategis ini selaras dengan prioritas di dalam RPJMN 2020-2024 dan PBI 2020-2045.



Peningkatan kesadaran terhadap risiko iklim masa depan untuk mengentaskan kemiskinan di perkotaan. Hal ini meliputi (i) peningkatan kesadaran pembuat keputusan; teknokrat; pemerintah daerah; utilitas; sektor swasta, usaha mikro, kecil, dan menengah; lembaga pembiayaan; dan masyarakat yang menghadapi risiko iklim jangka panjang dan dampaknya pada kehidupan, mata pencaharian, dan kesejahteraan masyarakat miskin kota; (ii) pengambilan keputusan berdasarkan informasi risiko dalam penyusunan dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan, khususnya yang memperkenalkan pemanfaatan sumber daya alam; (iii) peningkatan kapasitas terkait risiko iklim pada tingkat sistem seperti rantai pasok, untuk mengidentifikasi solusi lintas sektor di berbagai skala; (iv) penggunaan informasi risiko untuk memprioritaskan pengeluaran di daerah dan/atau di perkotaan; (v) pengintegrasian topik peningkatan kesadaran risiko iklim ke dalam pendidikan formal dan program peningkatan kapasitas untuk staf pemerintah di tingkat nasional maupun daerah, serta masyarakat, khususnya perempuan; dan (vi) harmonisasi beragam data yang digunakan untuk program pengentasan kemiskinan dengan data iklim dan risiko bencana.



Mengenali faktor pendorong kerentanan dalam penyusunan kebijakan perubahan iklim. Hal ini meliputi (i) pertimbangan migrasi karena iklim dalam penyusunan program pengentasan kemiskinan di perkotaan, khususnya perlindungan sosial, mata pencaharian, dan program perumahan sosial; dan (ii) Adopsi pendekatan inovatif, termasuk pendekatan berbasis masyarakat untuk mengatasi isu kepemilikan tanah, yang merupakan pembentuk utama kerentanan masyarakat miskin kota. Penyusunan kebijakan, rencana, dan prioritas perubahan iklim nasional perlu mengenali pentingnya mengatasi faktor pendorong kerentanan.



Meningkatkan investasi “no regret” atau “low regret” sebagai solusi ketahanan. Solusi seperti ini memiliki kinerja baik di berbagai skenario iklim, dan dapat menurunkan kerentanan dan meningkatkan ketahanan masyarakat miskin kota terhadap bahaya saat ini dan yang akan datang. Sebagai contoh: (i) memperkenalkan infrastruktur hijau untuk adaptasi sebagai bagian dari program pengentasan kemiskinan yang terkait dengan layanan dasar, mata pencaharian, dan perlindungan sosial; (ii) menguatkan integrasi sistem peringatan dini; dan (iii) memperkenalkan rencana tata ruang yang terinformasi risiko iklim dan bencana yang dapat mendukung peningkatan ketahanan.



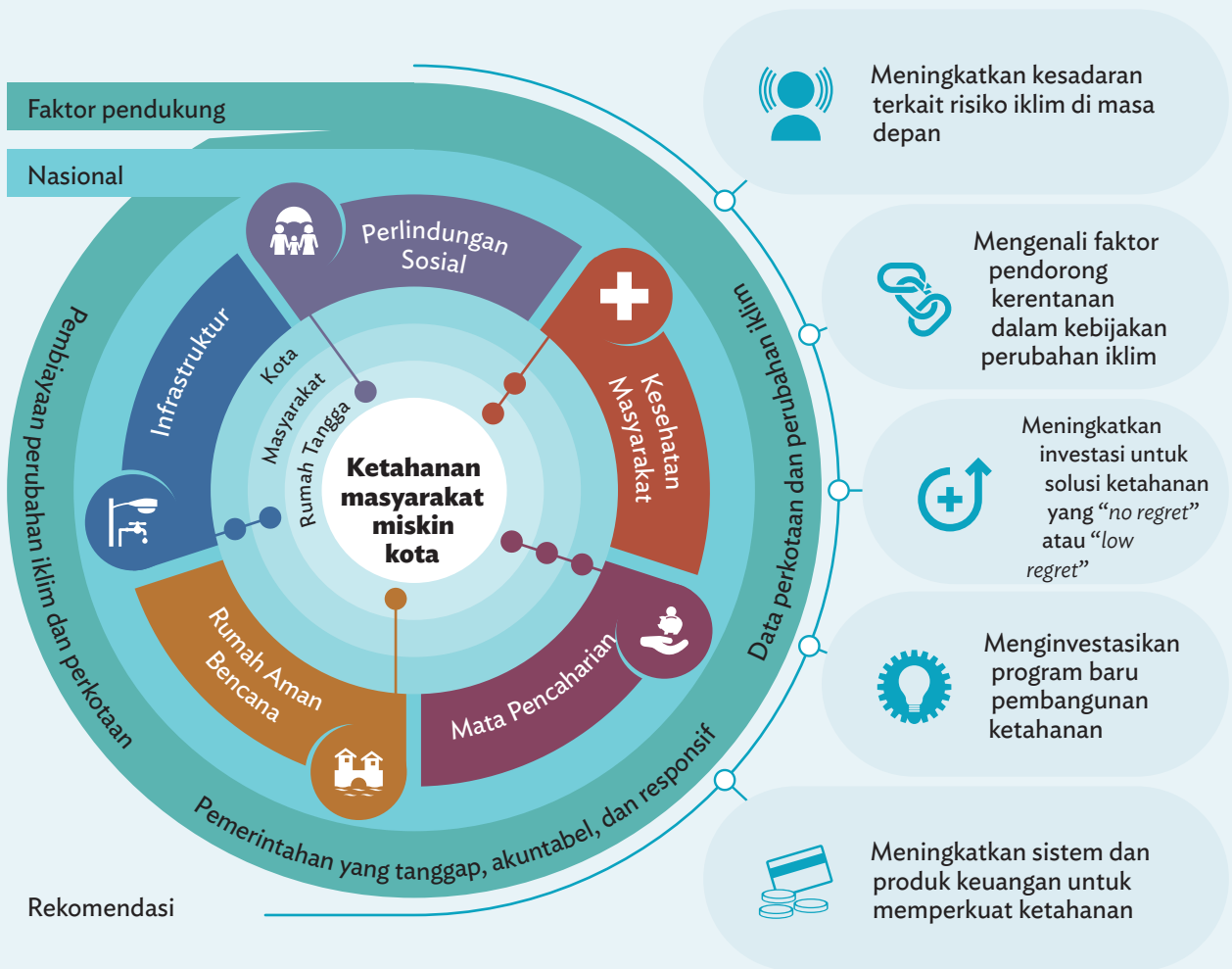
Menginvestasikan program peningkatan ketahanan. Hal ini meliputi (i) mempekerjakan pekerja informal perkotaan dan migran akibat perubahan iklim selama masa paceklik dalam program pekerjaan umum yang memperkuat ketahanan seperti pembangunan drainase, serta infrastruktur hijau seperti perlindungan mangrove dan pertanian perkotaan; (ii) melaksanakan program yang terintegrasi antara kesehatan, mata pencaharian, dan infrastruktur dengan dukungan untuk pekerja luar ruangan melalui cara hidup terhidrasi dan infrastruktur yang adaptif terhadap tekanan panas; dan (iii) memperkenalkan peningkatan ketahanan untuk usaha kecil dan menengah melalui informasi risiko, rencana usaha berkelanjutan, dan mekanisme insentif.



Meningkatkan sistem dan produk keuangan untuk memperkuat ketahanan. Hal ini meliputi (i) memperkuat sistem keuangan publik untuk pembiayaan jangka panjang (belanja modal, operasional, dan biaya pemeliharaan) untuk membangun ketahanan di perkotaan; (ii) memperkuat sistem, termasuk kapasitas pemerintah perkotaan untuk mengakses pembiayaan perubahan iklim dalam

mengimplementasikan aksi prioritas ketahanan; (iii) mengembangkan inovasi produk keuangan untuk membangun ketahanan masyarakat miskin kota, seperti instrumen fiskal berbasis lahan dan obligasi hijau; dan (iv) mengembangkan pendekatan inovatif seperti pembiayaan berbasis prakiraan untuk mengakses pembiayaan ex ante untuk tanggap darurat pascabencana.

Kerangka pembangunan ketahanan masyarakat miskin kota



Sumber: Asian Development Bank.

“Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan program yang berpihak pada masyarakat miskin kota dapat ditingkatkan untuk mengatasi risiko iklim yang ada saat ini, khususnya yang berada di sektor prioritas.”

Pembangunan Ketahanan Masyarakat Miskin Kota Indonesia

Risiko iklim mengancam pembangunan sosial ekonomi Indonesia dan memperburuk penderitaan penduduk Indonesia yang hidup di bawah dan dekat dengan garis kemiskinan. Perkotaan adalah kawasan yang responsif (hot spots) terhadap risiko iklim dan bencana, yang berdampak pada kehidupan, mata pencaharian, dan kesejahteraan masyarakat miskin dan hampir miskin yang tinggal di daerah kumuh dan permukiman informal. Tumbuhnya urbanisasi dan meningkatnya risiko iklim menyebabkan penguatan ketahanan masyarakat miskin kota melalui intervensi dengan strategi koping, inkremental, dan transformatif di berbagai skala menjadi sangat penting. Laporan ini mengidentifikasi solusi ketahanan iklim yang berpihak pada masyarakat miskin sesuai dengan bidang prioritas beserta faktor pendukungnya, memperkuat kebijakan dan program yang sudah ada, dan mempertimbangkan sektor prioritas dalam pembangunan berketahanan iklim.

Tentang *Asian Development Bank*

ADB berkomitmen mencapai Asia dan Pasifik yang makmur, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, serta terus melanjutkan upayanya memberantas kemiskinan ekstrem. Didirikan pada 1966, ADB dimiliki oleh 68 negara anggota—49 di antaranya berada di kawasan Asia dan Pasifik. Instrumen utama ADB untuk membantu negara berkembang anggotanya adalah dialog kebijakan, pinjaman, investasi ekuitas, jaminan, hibah, dan bantuan teknis.



Asian Development Bank
6 ADB Avenue, Mandaluyong City
1550 Metro Manila, Philippines
www.adb.org